**Bandar Maulana**
Jurnal Sejarah Kebudayaan
Vol. 30, No. 1, Maret 2025
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/BandarMaulana

# PERAN GEREJA SANTO YUSUP BINTARAN MASA REVOLUSI 1946-1949

**Alfania Dhiva Febryana*, Silverio Raden Lilik Aji Sampurno**
Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma
Jl. STM Pembangunan, Mrican, Depok, Sleman
Email*: alfaniadhiva17@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini menggali peran Gereja St. Yusup Bintaran pada masa penting Republik Indonesia, khususnya pada masa revolusi Indonesia, 1946-1949. Berdasarkan penelitian Sejarah menggunakan sumber-sumber yang tersedia, diketahui bahwa tokoh Soegijapranata menggerakkan Gereja Santo Yusup Bintaran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dilatarbelakangi oleh semangat nasionalisme dalam dirinya. Soegijapranata mengemukakan dan memberi arahan umat Katolik untuk cinta tanah air berdasarkan ajaran Kristus. Kedatangan Belanda kembali sering kali membuat kerusuhan di daerah-daerah, yang memuncak pada agresi militer Belanda. Pada saat krisis keamanan di Yogyakarta, Gereja Santo Yusup Bintaran digunakan oleh masyarakat sekitar untuk mengungsi atas arahan dari Soegijapranata selaku Uskup Semarang.

**Kata Kunci:** *Gereja Santo Yusup Bintaran, Soegijapranata, Agresi Militer Belanda, Katolik Indonesia, pengungsi*

## ABSTRACT

*This study explores the role of St. Joseph Church in Bintaran during a crucial period in the Republic of Indonesia, particularly during the Indonesian Revolution of 1946-1949. Based on historical research using available sources, it is known that Soegijapranata, the figure who founded St. Joseph Church in Bintaran, was motivated by his strong sense of nationalism. Soegijapranata encouraged the Catholic community to love their homeland based on the teachings of Christ. The return of the Dutch often caused unrest in the regions, culminating in Dutch military aggression. During the security crisis in Yogyakarta, the church became a shelter for local residents as refugees, under the direction of Soegijapranata, Bishop of Semarang.*

**Keywords:** *St. Joseph Church in Bintaran, Soegijapranata, Dutch Military Aggression, Indonesian Catholics, refugees*

## PENDAHULUAN

Gereja Santo Yusup Bintaran saat ini merupakan salah satu paroki yang berada di Kevikepan Yogyakarta Timur, Keuskupan Agung Semarang. Gereja Santo Yusup Bintaran terletak di kampung Bintaran Kulon, oleh karena itu masyarakat setempat menyebutnya dengan Gereja Bintaran. Gereja Santo Yusup Bintaran dibangun sekitar tahun 1933, diprakasai oleh Romo H. van Driessche, SJ, Bapak Dawoed, serta Pastor A. Van Kalken, SJ. Gereja Santo Yusup Bintaran dirancang oleh J.H. van Oijen B.N.A. dan dibangun oleh Hollandsche Beton Maatschappij (Koesworo, 1994:11-12). Pada awal berdirinya Gereja Bintaran, Gereja ini menggunakan nama "Santo Yusup" sebagai pelindung paroki. Dipilihnya nama "Santo Yusup" sebagai pelindung dikarenakan adanya pertimbangan bahwa Santo Yusup dikenal sebagai bagian dari keluarga Nazaret. Gereja dunia menjadikan "Santo Yusup" Sebagai santo pelindung karena jika Yesus ditempatkan sebagai kepala Gereja, maka Yusup sendiri menjadi pelindung gereja anaknya (Soedijono, 1998:17).

Latar belakang dibangunnya Gereja Santo Yusup Bintaran adalah penuhnya Gereja Kidul Loji yang pada awal abad 20 menjadi pusat peribadatan umat Katolik di Yogyakarta. Maka dari itu, dibangunlah gereja di sebelah timur sungai Code, di kampung Bintaran (Goenawan, 1993:46-47). Umat di gereja tersebut didominasi oleh orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. Hal ini agak berbeda dengan Gereja Kidul Loji yang lebih terbuka bagi kaum bumiputera. Namun ketika masyarakat bumiputera mengikuti ibadah, mereka tidak menempati gedung gereja tetapi berada di sisi timur gereja dan duduk lesehan. Dengan semakin bertambahnya umat Katolik di Yogyakarta, Gereja Kidul Loji tak mungkin menampung umat. Gereja Santo Yusup Bintaran diresmikan pada Minggu, 8 April 1934 oleh Pastor A. Th. van Hoof, SJ. Peresmian ini dihadiri oleh banyak umat dan berlangsung dengan meriah.

Penelitian ini hendak menunjukkan letak penting Gereja Santo Yusup Bintaran pada masa revolusi tahun 1946-1949. Soegijapranata sebagai Uskup Semarang pada masa itu memiliki peran penting dalam mendukung pemerintahan Indonesia. Hal ini menunjukkan peran dan kontribusi Gereja Katolik pada masa yang sangat krusial dalam sejarah Indonesia. Untuk itu penelitian ini hendak menjawab dua permasalahan pokok, yaitu apa latar belakang Soegijapranata menggerakkan Gereja Santo Yusup Bintaran dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan apa peran Gereja Santo Yusup Bintaran pada masa revolusi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tahapan-tahapan penelitian Sejarah. Tahapan tersebut berupa pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013:70). Topik yang dipilih adalah peran Gereja Santo Yusup Bintaran pada masa revolusi 1945-1949. Topik ini akan diteliti berdasarkan sumber-sumber primer berupa pemberitaan surat kabar pada masa itu. Data-data akan diverifikasi sehingga didapatkan data yang historis. Tahap selanjutnya adalah interpretasi data-data dan penulisan sejarah.

Sumber yang digunakan digolongkan dalam dua jenis sumber, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari majalah *Claverbond* dan catatan harian Soegijopranata. Majalah *Claverbond* merupakan media komunikasi misionaris pada masa itu sehingga memberitakan peristiwa masa itu. Sementara itu Soegijapranata sebagai pelaku sejarah meninggalkan catatan-catatan harian yang sangat berharga yang menunjukkan peristiwa-peristiwa masa itu. Sementara sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, artikel jurnal, skripsi, dan situs website. Majalah

*Claverbond* diakses di perpustakaan Kolese Ignatius (Kolsani), dan catatan harian Soegijapranata didapatkan dari buku *Soegija, Catatan Harian Seorang Pejuang Kemanusiaan* karya Budi Subanar. Buku tersebut berisikan catatan Soegija selama periode 13 Februari 1947 hingga 17 Agustus 1949 yang telah dialihaksarakan.

Analisis dalam tahapan interpretasi pada penelitian ini akan menggunakan teori peran menurut Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas serta ajaran sosial gereja. Bruce J. Biddle dan Edwin J. Thomas mengemukakan bahwa peran disepadankan dengan "lakon" seorang aktor dalam panggung sandiwara. Seorang aktor harus patuh terhadap *script*, instruksi sutradara, peran sesama aktor, pendapat dan reaksi penonton, serta bakat pribadi aktor. Peran dalam kehidupan sosial masyarakat pun berjalan dengan demikian. Peran sesama pelaku dalam kehidupan sosial ibarat sesama individu dalam masyarakat, penonton diibaratkan sebagai masyarakat yang menyaksikan pembawaan peran oleh pelaku, serta sutradara diibaratkan seperti halnya penyelia, guru, orang tua ataupun *socializer* (Bruce J. Biddle & Edwin J. Thomas, 1966; bdk Suhardono, 1994:7). Di lain sisi, ajaran sosial gereja merupakan sebuah pandangan atau tanggapan Gereja Katolik mengenai isu sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ajaran sosial gereja dicetuskan sekitar tahun 1891 ketika Paus Leo XIII dalam ensikliknya berjudul *Rerum Novarum* membicarakan dengan tegas kondisi yang dialami oleh kaum buruh karena diperlakukan secara tidak manusiawi. Dalam dokumen lain berjudul *Gaudium Et Spes*, Gereja menyuarakan tugas gereja dalam dunia terutama yang berkaitan dengan perdamaian dunia (Hardawiryana, 2015:125-127).

## PEMBAHASAN

### Yogyakarta Pasca Kemerdekaan Indonesia

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaannya. Hal ini disambut baik oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan mengirim telegram ucapan selamat kepada Soekarno dan Moh. Hatta. Sri Sultan Hamengkubuwono juga mengucapkan selamat atas kemerdekaan Indonesia dan terpilihnya kedua tokoh tersebut sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan pernyataan bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan menjadi bagian dari negara Republik Indonesia, hubungan antara Yogyakarta dengan pemerintah pusat bersifat langsung, dan bahwa daerah Yogyakarta bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Sebagai reaksi spontan dari amanat sultan, rakyat menurunkan bendera Jepang dan menaikkan bendera Sang Saka Merah Putih pada tanggal 21 September 1945 (Nurharjarini, 2012:59-60).

Indonesia harus kembali berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Pada tanggal 15 September 1945, tentara Sekutu datang ke Indonesia diboncengi Netherlands Indies Civil Affairs (NICA). Tujuan dari kedatangan Belanda tersebut untuk membangun kembali negara koloni di wilayah Indonesia yang dahulu pernah mereka jajah (Safitri, 2023:23). Di lain sisi, Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia dan masih menganggap Indonesia sebagai tanah jajahan tak segan melakukan teror dan membuat kerusuhan, khususnya di Jakarta. Belanda melakukan teror terhadap para pemimpin bangsa Indonesia, seperti teror kepada Soekarno, Hatta, Syahrir, dan tokoh lain. Hal tersebut membuat situasi pemerintah Indonesia menjadi tidak aman lagi jika berada di Jakarta. Akhirnya pada tanggal 4 Januari 1946, ibukota Indonesia yang tadinya di Jakarta untuk sementara waktu dipindahkan ke Yogyakarta. Pada malam hari Soekarno, Moh. Hatta, dan pejabat pemerintah lainnya beserta keluarga pergi ke Yogyakarta menggunakan kereta api melalui rel yang berada di

belakang rumah Soekarno. Mereka tiba di Yogyakarta keesokan paginya disambut oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX beserta Pakualam VIII (Triyani, 2013:206).

Indonesia melakukan berbagai upaya perundingan dengan pihak Belanda untuk mencapai kesepakatan damai. Perundingan dilakukan beberapa kali, namun pihak Belanda selalu melanggar kesepakatan karena mereka ingin kembali menguasai Indonesia. Pada 21 Juli 1947, Belanda melakukan penyerangan ke beberapa wilayah Indonesia, termasuk daerah pedalaman melalui jalur darat, laut, dan udara. Pada 23 Juli 1947, Indonesia mendapatkan bantuan obat-obatan dari Palang Merah Malay. Obat-obatan tersebut dikirimkan ke Indonesia menggunakan pesawat Dakota VT-CLA namun pesawat tersebut jatuh ditembak dua pesawat pemburu milik Belanda. Pesawat itu jatuh di daerah Ngoto (sebelah selatan Kota Yogyakarta). Penembakan tersebut menggugurkan beberapa perwira seperti Adisutjipto, Abdurachman Saleh, dan Adi Sumarmo. Di lain sisi simpatisan bagi Palang Merah Indonesia juga datang dari India. Pada 28 dan 29 Agustus 1947, pemerintah India mengirimkan obat-obatan dengan dua pesawat serta 3 dokter (Nurharjarini, 2012:76).

Belanda tidak puas dengan perjanjian tersebut sehingga kemudian melakukan serangan kembali terhadap Indonesia. Agresi Militer Belanda II bertujuan untuk menghancurkan kedaulatan bangsa Indonesia. Pada 19 Desember 1948, Belanda melakukan serangan terhadap Pangkalan Udara Maguwo, Yogyakarta. Pangkalan Udara Maguwo merupakan salah satu titik penting bagi perlindungan Indonesia pada waktu itu. Pada waktu penyerangan, komunikasi dari Maguwo ke pemerintah pusat sudah terputus sehingga situasi di Maguwo tidak diketahui oleh para pemimpin dan masyarakat sipil di Yogyakarta. Indonesia melakukan perlawanan yang dipimpin oleh Kasmiran dengan 40 pasukan, namun mereka semua gugur dalam perlawanan tersebut dan Maguwo sepenuhnya berada di tangan Belanda. Setelah berhasil menguasai Pangkalan Udara Maguwo, Belanda meneruskan gerakan ke wilayah Kota Yogyakarta. Pada pukul 16.00, Belanda berhasil menduduki seluruh Kota Yogyakarta. Jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda membuat pasukan yang berada di Kota Yogyakarta melarikan diri ke luar kota. Akibat agresi militer Belanda tersebut, muncul gerakan-gerakan untuk melakukan perlawanan dari rakyat Indonesia, khususnya di daerah-daerah. Perlawanan dilakukan dengan pertempuran secara terang-terangan dan gerilya (Nurharjarini, 2012:81). Puncak dari agresi di Yogyakarta ialah serangan umum 1 Maret. Dalam melaksanakan serangan ini para pasukan menyiapkan beberapa tahapan seperti tahap persiapan, pelaksanaan serangan, dan tahap akhir serangan. Pada tahap persiapan, dilakukan koordinasi antar sektor serta pemaksimalan persenjataan. Tahap pelaksanaan dilakukan pada 1 Maret 1949 pukul 06.00. Sirine dibunyikan dan dilakukan penyerangan ke Kota Yogyakarta dari empat arah. Dalam penyerangan ini, pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan Belanda dari Kota Yogyakarta (Pratama, 2023:104-106).

Dalam maklumat Seri Paduka Kandjeng Sultan Jogjakarta no.1 tahun 1949, dikatakan bahwasanya Daerah Istimewa Yogyakarta diserahkan kembali secara berangsur-angsur oleh pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia. Beberapa daerah di Yogyakarta diserahkan secara bertahap seperti dijelaskan dalam surat tersebut bahwa penyerahan dilakukan dalam empat tingkatan. Tingkatan daerah pertama yang diserahkan ialah Kota Yogyakarta dan sekitarnya (Gamping, Kasihan, Kotagede, dan Depok). Pada tingkatan kedua, Belanda mengembalikan tempat-tempat yang diduduki di daerah Kabupaten Sleman. Tahapan ketiga, Belanda mengembalikan daerah yang diduduki di Kabupaten Kulonprogo, Adikarta, dan Bantul (termasuk juga Surakarta di Imogiri dan Kotagede). Pada tingkatan keempat, Belanda mengembalikan daerah kedudukannya di Gunungkidul. Kemudian dalam surat penyerahan daerah Jogjakarta juga menegaskan bahwa sebelum melakukan penyerahan dalam tingkat satu, dewan keamanan Republik Indonesia meminta daerah

yang menjadi kekuasaan Belanda menurut perjanjian Renville diserahkan kembali dan pusat pemerintahan republik dikembalikan ke Yogyakarta (Arsip BPAD DIY, 1946).

**Latar Belakang Keterlibatan Gereja dalam Perang Kemerdekaan**

Soegijapranata, SJ merupakan seorang Vikariat Apostolik Semarang pertama yang berasal dari kaum bumiputera. Dia diangkat menjadi seorang uskup pada 1 Agustus 1940 di Gereja Randusari Semarang oleh Mgr. P. Willekens, SJ. Perjalanan Soegijapranata selama masa-masa awalnya menjadi seorang uskup tidaklah mudah pada saat Indonesia masih berada di tangan Pemerintah Kolonial. Keterlibatan Gereja dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia juga diprakarsai oleh Soegijapranata. Pada masa pendudukan Jepang dan Belanda, ia memegang misi di wilayah Jawa. Semangat cinta tanah air telah tumbuh dalam dirinya sejak masih bersekolah, sehingga ia pun menjadi tergerak untuk terlibat dalam berjuang mengusahakan kemerdekaan. Kecintaannya terhadap tanah air tertuang dalam tulisan-tulisannya. Keterlibatannya dalam memperjuangkan kemerdekaan dilatarbelakangi oleh rasa cinta tanah air, dimana ia memiliki gagasan-gagasan mengenai hal tersebut.

**Gambar 1.** Soegijapranata



**Sumber:** Majalah *Claverbond*, 1946

Pada saat ia masih berada di Pastoran Kolese Xaverius Muntilan, Soegijapranata menuliskan gagasannya dalam media massa. Ia mengungkapkan demikian:

> *"Setiap bangsa harus berkembang dengan pemerintahannya sendiri. Adalah mudah bagi suatu pemerintahan untuk mengatur suatu bangsa yang homogen, daripada mengatur bangsa yang beragam ada heterogen. Keberadaan bangsa dan negara didasarkan pada hukum kodrat. Sebelum suatu bangsa dipersatukan dalam pemerintahan sebuah negara, bangsa tersebut sudah dipersatukan oleh karakternya, kebiasaan-kebiasaannya, cita-citanya, bahasa, dan asal-usulnya. Karenanya, kodrat suatu bangsa menjadi landasan utamanya. Sedangkan pemerintahan dibentuk untuk mengatur, dan bukan sebaliknya. Karenanya hak suatu bangsa untuk memiliki kemerdekaannya. Dengan demikian, kemerdekaan negara dan pemerintahan adalah sarana untuk mengatur dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan pemerintah".* (dikutip dari Sudimin & Gunawan, 2015:80)

Dalam hal tersebut, Soegijapranata mengungkapkan bahwa sebuah bangsa terbentuk karena

adanya kesamaan tertentu. Sebuah bangsa memiliki hak kodratinya untuk merdeka dalam mengatur dirinya sendiri. Sebuah pemerintahan diperlukan oleh suatu bangsa untuk mengatur tata kehidupan bangsa dan mencapai kesejahteraan umum. Kolonialisme yang terjadi pada masa itu tentunya tidak sejalan dengan kodrat kemerdekaan bangsa. Oleh sebab itu, dalam Pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa: "Penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan". Soegijapranata sangat tidak mendukung adanya penjajahan. Beliau menyiarkan tentang kebebasan melalui tulisannya.

Soegijapranata mendukung kemerdekaan Indonesia secara penuh dengan mengungkapkan bahwa

> *"Gereja pun perlu berpartisipasi dalam melakukan sebuah gerakan sah secara hukum untuk memperoleh hak memerintah sendiri. Keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh sifat pergerakan kemerdekaan dan interpretasi Nasionalisme, Cita-cita nasional merupakan suatu yang alamiah yang akan tetap terjadi tanpa peran kita. Sedangkan, Nasionalisme kita tidak lain dari pengakuan dan penghormatan kita dengan kerendahan hati dan rasa syukur adikodrati, serta atas situasi yang sedang dihadapi dengan pandangan kehidupan yang akan datang"* (Subanar, 2005:77)

Menurut Soegijapranata, agama dan negara bukanlah sebuah pilihan melainkan pergumulan warga negara yang beragama dimana manusia hidup dalam dua instansi sekaligus. Ia juga menegaskan bahwa orang-orang Katolik perlu memperhatikan baik kepentingan Gereja maupun negara. Oleh karenanya, ketika orang-orang Katolik merasa benar-benar Katolik juga perlu merasa patriotik. Dalam konteks ini, patriotisme yang dimaksud oleh Soegijapranata merupakan kata untuk menunjukkan semangat nasionalisme (Sudimin & Gunawan, 2015:85).

**Gereja Santo Yusup Bintaran sebagai Tempat Pengungsian**

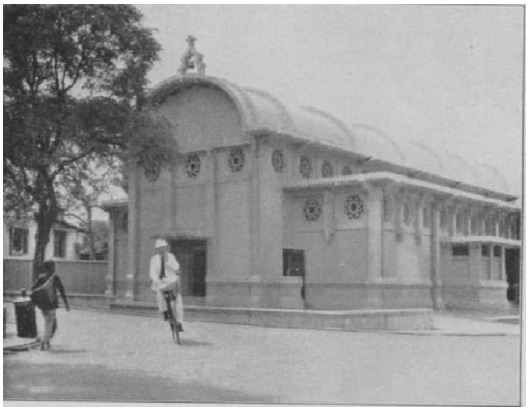
Soegijapranata sebagai Vikaris Apostolik Semarang dan bagian dari bangsa Indonesia, menunjukkan nasionalisme dan keberpihakannya kepada bangsa Indonesia dengan memindahkan Vikariat Apostolik Semarang ke Yogyakarta mengikuti kepindahan Ibukota Republik Indonesia. Soegijaprata secara khas menunjukkan perannya sebagai pemimpin Gereja Katolik di Semarang. Dia memindahkan tempat tinggalnya ke Paroki Santo Yusup Bintaran. Mewakili Gereja di dalam sebuah negara yang baru merdeka dan memerintah dari tempat pengasingan, Soegijapranata menjalankan segala aktivitas pastoralnya di Yogyakarta, seperti merayakan Misa, khotbah dan mengajar, kunjungan pastoral, menghadiri pertemuan-pertemuan, dan lain sebagainya.

Serangan Belanda yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda I menimbulkan reaksi dari banyak pihak termasuk dunia internasional. Dewan Keamanan PBB berusaha menengahi pertikaian Belanda dengan Indonesia melalui perundingan Renville yang diawasi langsung oleh Komisi Tiga Negara atau KTN. Pada kenyataannya Belanda tetap melakukan serangan-serangan. Serangan besar berikutnya dikenal dengan Agresi Militer Belanda II. Pada tanggal 19 Desember 1948 pesawat-pesawat Belanda melintas di langit Kota Yogyakarta. Pesawat tersebut disangka sebagai penyambut Presiden Soekarno yang akan berangkat ke India. Pesawat-pesawat tersebut justru menjatuhkan bom di sisi timur kota dan Lapangan Udara Maguwo (Nurharjarini, 2012:77).

Di tanggal yang sama, pada pukul 8 pagi di Gereja Santo Yusup Bintaran sedang berlangsung Misa dan penerimaan Sakramen Tobat serta Komuni. Dua jam sebelumnya telah terdengar gemuruh pesawat terbang, tetapi Soegijapranata tetap memerintahkan pelaksanaan Misa meriah seperti biasa karena mengira suara tersebut berasal dari angkatan udara yang sedang berlatih. Pada pukul 11 siang, Belanda menjatuhkan bom di pusat kota. Secara terus-menerus terdengar suara dentuman bom,

pesawat yang mederu, dan tembakan. Banyak pengungsi meminta kepada Soegijapranata untuk dapat mengungsi di pastoran Bintaran. Upacara gereja diputuskan untuk batal. Seiring berlangsungnya pengeboman sepanjang hari, terdengar kabar bahwa tentara KNIL telah menduduki Kota Yogyakarta sejak pukul 14.00 WIB. Dalam rangka memastikan keamanan para pengungsi, pada malam harinya dilakukan penjagaan bergilir di Pastoran Bintaran (Subanar, 2012:233).

**Gambar 2**. Gereja Bintaran (c. 1946)



**Sumber:** Majalah *Claverbond*, 1946

Berdasarkan kesaksian H. Th. Bastiaanse, SJ dalam majalah *Claverbond* tahun 1950, diceritakan bahwa malam tersebut terasa begitu mencekam, dimana-mana hanya terdengar suara anjing dan tembakan. Rumah-rumah penduduk di sekitar gereja menjadi target penjarahan sistematis oleh gerilyawan Indonesia sehingga banyak dari mereka mengungsi di Gereja Santo Yusup Bintaran. Para pengungsi diterima oleh pihak gereja tanpa dilihat latar belakang kepercayaannya. Malam itu ada sekitar 80 hingga 100 orang pengungsi yang mencari perlindungan di Pastoran Gereja Santo Yusup Bintaran. Mereka datang dengan membawa barang bawaan serta barang berharga. Pada malam itu masih terdengar suara tembakan dan dentuman keras (*Claverbond*, 1950:35).

Ada kejadian lain di pastoran yaitu ketika dari luar pastoran, ada yang mengetuk pintu dengan keras. Seperti dikisahkan dalam *Claverbond* 1950, seorang Bruder kemudian membukakan pintu dan menyambut dengan hangat segerombolan orang berwajah garang. Gerombolan tersebut menerobos masuk seraya menodongkan senjata api pada para pengungsi. Bruder tersebut bertanya secara sopan dalam bahasa Jawa mengenai tujuan orang-orang tersebut datang ke pastoran serta menawari mereka untuk duduk. Setelah yakin bahwa orang-orang di pastoran Bintaran hanyalah para pengungsi dan biarawan yang tidak berpotensi sebagai ancaman, ketua gerombolan tersebut mengajak anak buahnya untuk meninggalkan pastoran Bintaran seraya merampas barang-barang para pengungsi (*Claverbond*, 1950:36). Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa masih ada pejuang Indonesia yang mencurigai gereja sebagai golongan pembelot yang memihak pada Belanda.

Dalam kesaksian tersebut terlihat bahwa gereja pada waktu didatangi banyak orang untuk meminta perlindungan. Mereka merasa aman ketika berada dalam gedung gereja. Bila tinggal di rumah mereka sendiri, mereka takut rumahnya dijarah atau diserang oleh para gerilyawan. Ketika mengungsi ke gereja, mereka dijaga oleh para misionaris. Kepercayaan masyarakat pada gereja menunjukkan bahwa Gereja Santo Yusup Bintaran memiliki reputasi baik di mata masyarakat sekitar sehingga meskipun mereka tidak beragama Katolik namun bersedia berkumpul bersama umat Katolik di pastoran tersebut tanpa khawatir akan adanya diskriminasi.

Pada 20 Desember 1948 di Gereja Santo Yusup Bintaran, dilakukan Misa seperti biasa pada

pukul 6.30 pagi dengan pintu-pintu tertutup kecuali pintu Sakristi. Sesudah Misa, Soegijapranata memberikan instruksi kepada umat Katolik agar tidak segera kembali ke rumah demi keselamatan diri dan keluarga. Mereka juga diminta untuk tidak menyimpan senjata (Subanar, 2012:235). Hari-hari berikutnya di Gereja Santo Yusup Bintaran masih dilakukan Misa seperti biasa, namun seturut arahan Soegijapranata pintu-pintu gereja harus ditutup agar tidak menarik perhatian tentara Belanda.

**Gambar 3.** Bagian Altar Gereja Santo Yusup Bintaran



**Sumber:** Dokumen Peneliti, 22 Juni 2024

Dalam situasi tersebut, Soegijapranata memastikan keselamatan umat Katolik. Ketika di luar gereja terjadi serangan dari Belanda, dia meminta umat untuk tetap tinggal di dalam gereja. Selain itu dia juga memastikan keamanan gereja dengan melakukan penjagaan secara bergantian setiap malam hari. Dalam situasi genting tersebut, dia tetap memastikan pelayanan gereja terlaksana dengan baik. Tiap harinya di Gereja Santo Yusup Bintaran tetap dilaksanakan Misa dengan pintu gereja tertutup untuk menjaga keselamatan umat. Kepedulian Soegijapranata juga terlihat ketika dia memberikan himbauan kepada umat untuk tetap mengutamakan keselamatan diri dan keluarga. Ia juga meminta agar umat yang mengungsi di pastoran tetap berada di pastoran demi keselamatan bersama.

Jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda membuat pasukan yang berada di Yogyakarta pergi mengundurkan diri ke luar kota. Dipimpin oleh Komandan Brigade X Letkol Soeharto, para pejuang merencanakan serangan balasan pada Belanda. Semula, serangan balasan tersebut direncanakan terlaksana pada 20 Desember 1948, tetapi diundur menjadi 29 Desember 1948 karena menyesuaikan dengan rencana serangan di Bantul (Nurharjarini, 2012:83-84).

Pada tanggal 5 Januari 1949 Soegijapranata berpesan kepada Suwandi untuk disampaikan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX agar tetap berada di dalam kraton dan tidak perlu ikut dalam mengangkat senjata, namun ia berpesan agar Sultan tetap berada di tengah masyarakat guna mencegah adanya kekerasan dari tentara kepada penduduk dan agar tidak terjadi perpecahan di keraton (Subanar, 2012:248). Seperti diketahui, Yogyakarta telah jatuh ke tangan Belanda dan sedang terjadi peperangan di luar kraton. Jika Sultan turun ke lapangan, hal ini dapat membuat rakyat khawatir dan menambah keadaan tidak stabil.

Di sisi lain, serangan-serangan gerilya yang dilancarkan terhadap Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta. Serangan ini dilakukan sebanyak tiga kali. Pertama, pada tanggal 29 Desember 1948 pukul 4 pagi dilakukan serangan ke kota Yogyakarta dari segala penjuru (sekitar Kantor Pos dan Secodiningratan, Patuk, Pakuningratan, Sentul, Pongok, dan Gondokusuman). Serangan berikutnya pada tanggal 9 Januari 1949 dan 4 Februari 1949, namun serangan ini tidak begitu mempengaruhi kedudukan Belanda di Yogyakarta. Maka dari itu dirancang serangan besar-besaran oleh Letkol Soeharto dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yaitu pada 1 Maret 1949. Pada tanggal 1 Maret 1949 tepat jam 6 pagi, berbunyilah sirine yang menandakan pasukan gerilya masuk ke kota. Pasukan gerilya

masuk melalui Kuncen menuju Patuk. Terdapat sekitar 2000 pasukan dari berbagai arah menuju Kota Yogyakarta.

Dari arah selatan, pasukan gerilya bergerak atas komando Mayor Soedjono dan memukul mundur pasukan Belanda di Pagelaran dan Kaben. Pasukan gerilya di sisi barat yang dipimpin oleh Mayor H.N. Soemoeal menargetkan wilayah sekitar Malioboro, Hotel Tugu, Hotel Merdeka, dan Benteng Vredeburg. Dari sisi utara, pasukan gerilya dipimpin oleh Mayor Soekasono yang bertugas untuk merebut kawasan Mrican. Pasukan ini juga berhasil memukul kedudukan Belanda di Klitren, Pingit, Jetis, dan Gondolayu. Sebagian pasukan membantu pasukan SWK 105 yang menyerang dari sisi timur untuk mengikat pasukan Belanda di Maguwo agar tidak masuk ke kota Yogyakarta. Pasukan SWK 105 memiliki sasaran di Lapangan Udara Maguwo, Tunjungtirto, Kalasan, dan Prambanan. Pasukan ini berhasil memukul mundur pasukan Belanda yang berada di Maguwo (Pratama, 2023:105-106).

Dalam catatannya, Soegijapranata menggambarkan keadaan tanggal 1 Maret 1949. Saat itu posisi Gereja Santo Yusup Bintaran dalam keadaan terkepung karena sejak pukul 4.30 pagi serangan telah dimulai di kampung Sayidan, sepanjang sungai Code, wilayah makam Cina, dan sawah sebelah selatan Bintaran. Pada saat itu tetap diadakan Misa di Gereja Santo Yusup Bintaran pada pukul 7 pagi dengan pintu-pintu tertutup serta menggunakan lampu lentera. Gereja Santo Yusup Bintaran hanya terisi orang-orang pastoran termasuk para pengungsi (Subanar, 2012:264).

Pada tanggal 2 Maret 1949, bertepatan dengan perayaan Rabu Abu, terdengar bunyi tembakan di sekitar Gereja Santo Yusup Bintaran sejak jam 5 pagi. Pada pukul 06.45 pagi, Soegijapranata sedang menyiapkan dan memberkati abu untuk misa. Dikarenakan keadaan di luar yang belum kondusif, misa Rabu Abu hanya dihadiri oleh orang-orang yang tinggal di pastoran Gereja Santo Yusup Bintaran. Tidak ada umat dari luar yang hadir pada waktu itu. Hari berikutnya, misa dilakukan seperti biasa. Setelah misa terdapat seseorang yang menghadap Soegijapranata untuk meminta izin tinggal di pastoran Gereja Santo Yusup Bintaran. Akan tetapi, Soegijapranata mengungkapkan bahwa pada saat itu Pastoran Gereja Santo Yusup Bintaran sudah penuh dengan pengungsi dan gedung lainnya digunakan untuk sekolahan (Subanar, 2012:264).

Catatan harian Soegijapranata menjelaskan bahwa masih terdengar suara meriam dan 19 pesawat yang melintas di langit kota Yogyakarta pada tanggal 10 Maret 1949 ketika beliau sedang merayakan misa di Gereja Santo Yusup Bintaran. Pada hari berikutnya, masih terdengar serangan di wilayah sekitar Gereja Santo Yusup Bintaran namun terjadi hanya sebentar (Subanar, 2012:267). Pada akhirnya, serangan umum 1 Maret 1949 membuat seluruh kota Yogyakarta dikuasai kembali oleh Indonesia. Untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dilakukan tindakan pengamanan ketat di sepanjang jalan dari Tugu sampai Pasar Beringharjo. Wilayah ini ditutup untuk umum. Selain itu, diberlakukan jam malam mulai pukul 18.30 sampai 05.00. Pada tanggal 29 Juni 1949, para tentara Belanda mulai meninggalkan Yogyakarta. Dari peran Gereja Santo Yusup Bintaran yang menjadi tempat pengungsian dan aktif menerima masyarakat untuk mengungsi di gereja, dapat dilihat bahwa Gereja Santo Yusup Bintaran aktif berpartisipasi dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

## KESIMPULAN

Gereja Santo Yusup Bintaran ikut berpartisipasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa revolusi tahun 1946-1949. Pada masa yang sangat penting bagi Indonesia tersebut, Gereja Santo Yusup Bintaran memberikan tempat mengungsi bagi warga. Peran Gereja Santo

Yusup Bintaran ini diprakasai oleh Soegijapranata selaku Uskup dari Vikariat Apostolik Semarang. Soegijapranata sebagai uskup memainkan perannya dengan memindahkan pusat keuskupan dari Semarang ke Gereja Santo Yusup Bintaran di Yogyakarta tahun 1947. Soegijapranata mengemukakan bahwa Gereja perlu berpartisipasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia karena itu merupakan kewajiban dari warga negara. Melalui pilihan dan kegiatan Soegijapranata ini terlihat peran Soegijapranata sebagai pemimpin Gereja Katolik yang terlibat bagi kepentingan kemerdekaan Indonesia.

Masa revolusi yang ditandai dengan kembalinya Belanda ke wilayah Indonesia juga mengakibatkan konflik dan perang. Pada Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta, warga harus mencari perlindungan karena rumah-rumah mereka tidak aman. Soegijapranata menggunakan Pastoran Gereja Santo Yusup Bintaran sebagai tempat pengungsian bagi umat dan masyarakat di sekitarnya. Keterlibatan Gereja Santo Yusup Bintaran atas prakarsa Soegijapranata ini menunjukkan Gereja Santo Yusup Bintaran yang membuka diri bagi warga, tanpa melihat latar belakang mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa gereja tidak mewakili dan membela Belanda, tetapi membela kemerdekaan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

Arsip BPAD DIY (1949), "Maklumat Menteri Negara RI Koordinator Keamanan Nomor S/4 Tahun 1949 tentang Instruksi untuk alat-alat pemerintah RI di masa peralihan (pembagian pekerjaan antara Badan-badan Pemerintah RI Pusat dan Daerah setelah kekuasaan di DIY diserahkan kembali kepada Pemerintah RI)", BPAD.RIS.T2.IV.809.

### Majalah

*Claverbond,* 1950

### Buku dan Jurnal

Biddle, Bruce J., and Edwin J. Thomas. 1966. *Role Theory: Concepts and Research.* New York: John Wiley & Sons.

Dwi Ratna Nurharjarini. 2012. *Yogyakarta: Dari Hutan Beringin ke Ibukota Daerah Istimewa*. Yogyakarta: Balai Pelestarian dan Nilai Tradisional Yogyakarta.

Goenawan, R. 1993. *Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta: Mobilitas Sosial DI Yogyakarta Periode Awal Abad Dua Puluhan*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Koesworo, F. 1994. *60 Tahun Gereja St Yusup Bintaran Yogyakarta*. Yogyakarta: Panitia HUT 60 Paroki St Yusup Bintaran.

Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Pratama, S. 2023. "Penerapan Strategi Perang Gerilya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta." *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial*, 98–107.

Hardawiryana, S. R. 2015. *Gaudium Et Spes*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

Safitri, A. 2023. "Perjuangan Rakyat dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia pada Agresi Militer Belanda II 1948–1949 di Pulau Jawa." *Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 23–34.

Soedijono, F. 1998. *Gereja Santo Yusup Bintaran Yogyakarta: Dulu, Sekarang, dan Akan Datang*. Yogyakarta: Dewan Paroki Gereja Santo Yusup Bintaran.

Subanar, G. B. 2005. *Menuju Gereja Mandiri: Sejarah Keuskupan Agung Semarang di Bawah Dua Uskup (1940–1981)*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Subanar, G. B. 2012. *Soegija: Catatan Harian Seorang Pejuang Kemanusiaan*. Yogyakarta: Galang Press.

Suhardono, E. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sudimin, Theodorus, dan Yohanes Gunawan P. 2015. *Semangat dan Perjuangan Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Triyani, H. 2013. "Perpindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946." *AVATAR: e-Jurnal Pendidikan Sejarah* 2 (1): 204–14.